

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara sebagai salah satu pelaku utama. Perbankan di Indonesia mempunyai pangsa pasar sebesar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan yang ada (Zainal Abidin, 2007). Menurut Abdurrohman (2003), perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan di Indonesia sangat pesat setelah adanya liberalisasi keuangan dengan diberlakukannya berbagai kebijakan perbankan di antaranya Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun 1983) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988), namun sejalan perkembangan yang pesat tersebut menjadikan perbankan juga di anggap mempunyai peran besar sebagai faktor pemicu krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Indonesia.

Selama terjadinya krisis moneter tersebut, lembaga-lembaga keuangan banyak yang mengalami kesulitan keuangan. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan tingginya biaya modal sektor usaha, sehingga kemampuan sektor produksi menurun. Tingginya tingkat suku bunga juga berakibat pada fungsi intermediasi yang tidak seimbang dan tidak berjalan optimal. Penyebabnya adalah dana sektor perbankan dialihkan untuk alokasi instrumen moneter seperti Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia dan instrumen lainnya daripada untuk alokasi sektor riil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (Abdurrohman, 2003).

Dalam perekonomian bank memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi ini akan berjalan baik apabila *surplus unit* dan *deficit unit* memiliki kepercayaan terhadap bank. Berjalannya fungsi intermediasi perbankan akan meningkatkan penggunaan dana. Dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif. Aktivitas produktif ini kemudian akan meningkatkan output dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Muharam dan Purvitasari, 2007).

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank umum dapat memilih satu dari tiga pilihan yaitu seluruhnya beroperasi secara konvensional, seluruhnya beroperasi secara syariah atau melakukan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*).

Di Indonesia pembentukan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen.

Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) 1988. Dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 13 ayat (c) UU No 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk ketentuannya maka pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992 (Martono, 2002: 25).

Bank syariah yang kedua di buka pada tahun 1999, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), yang kemudian diikuti oleh beberapa bank umum yang membuka unit syariah seperti Bank Central Asia (BCA) syariah.

Pengembangan perbankan syariah selanjutnya diikuti dengan penetapan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah. Bank Indonesia (2002), menjelaskan bahwa Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang akan memberikan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Blueprint tersebut berisi antara lain untuk mengidentifikasi tantangan utama bank syariah di masa yang akan datang, selain itu juga untuk menyatakan visi, misi, dan tujuan strategis dari bank syariah. Blueprint secara singkatnya telah memberikan pedoman yang jelas bagi para *stakeholders* untuk menyamakan visi dan aspirasi.

Permasalahan perbankan di Indonesia salah satunya adalah masalah efisiensi. Sampai tahun 2010, efisiensi perbankan nasional dinilai masih rendah (Risky, 2013). Struktur perbankan yang sehat dan operasional yang efisien merupakan inti dari semua permasalahan karena baik atau buruknya perbankan akan banyak ditentukan oleh baik tidaknya struktur yang dibuat dan kebijakan yang efisien, disamping perlu adanya fungsi pendukung yang lain seperti pengawasan dan peraturan yang efektif (Wahyu, 2012).

Menurut D. Hadad, Wimboh S., Dhaniel I. dan Eugenia M. (2003) menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk mengukur efisiensi mempunyai dua macam pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan non parametrik. pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distributor Free Approach* (DFA) dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan non-parametrik terdapat pendekatan *Data Envelopment*

Analysis (DEA). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah non-parametrik, yaitu DEA.

Menurut Arcasya, Diana Y., dan Guruh S. R (2008) dalam Maflachatun (2010) mengatakan bahwa kelebihan dari pendekatan non-parametrik adalah tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi produksi dalam membentuk frontier produknya, oleh karena itu kesalahan dalam spesifikasi fungsi produksi dapat dieliminasi. D.Hadad, Wimboh S., Dhaniel I. Eugenia M. (2003) dalam Maflachatun (2010) menambahkan bahwa keuntungan relatif penggunaan pendekatan ini lebih besar dibandingkan parametrik, yaitu pendekatan ini dapat mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi. Sehingga hal tersebut dapat membantu mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan yang merupakan keuntungan utama dalam aplikasi manajerial.

Pengaplikasian model DEA telah banyak dilakukan untuk mengukur efisiensi suatu bank. Golany dan Storbeck (1999) menggunakannya untuk mengevaluasi efisiensi relatif operasional cabang sebuah bank di Amerika dengan 14 kantor cabangnya. Zenios et al. (1999) juga menggunakan DEA untuk menilai efisiensi relatif cabang-cabang Bank of Cyprus dan menggunakan DEA sebagai dasar benchmarking antar cabang.

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2012 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru. Jumlah BUS dan UUS tidak bertambah dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebanyak 11 BUS dan 24 UUS. Sementara itu jumlah

BPRS bertambah dari 155 BPRS menjadi 158 BPRS. Bertambahnya jumlah bank syariah juga diikuti dengan penambahan jaringan kantor bank syariah, yang pada periode laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah itu, 525 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS, dan 40 kantor lainnya merupakan jaringan kantor baru BPRS. Peningkatan jumlah kantor tersebut pada sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu (485 kantor), adapun penambahan Kantor Cabang tercatat sebanyak 68 kantor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA).”

B. Rumusan Masalah

Perkembangan perbankan syariah, baik kualitas maupun kuantitas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan kepercayaan pemerintah dan otoritas moneter semakin kuat dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang yang mengatur perbankan syariah sebagai upaya optimalisasi pengembangan perbankan tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank, maka hal tersebut tentu belum menunjukkan sejauh mana perusahaan tersebut telah menggunakan sumberdayanya (input) dengan baik untuk memperoleh hasil (ouput) yang diinginkan. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005-2008 yang

menyebutkan bahwa potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya menganut agama islam dan perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan internasional yang pesat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (studi pada 6 bank syariah tahun 2013).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (studi pada 6 bank syariah tahun 2013).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perbankan, khususnya tentang efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama belajar di bangku perkuliahan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap langkah dan kinerja perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi pada periode selanjutnya.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian dan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis dan juga agar dapat menambah perbendaharaan kepustakaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan secara materi-materi yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang terkait.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, uji instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini di uraikan tentang data yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN